

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah mampu membiayai sendiri dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan, pembangunan serta pelayanan daerah terhadap masyarakat dengan keuangan daerahnya sendiri tanpa ikut campur pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2015-2018 dengan total data observasi sebanyak 108 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Eviews 10.

Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,79%, sedangkan sisanya sebesar 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.